

IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 MORI UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA

Silvia Banibi¹⁾, Nasrullah²⁾, Andi Maman Firmansyah³⁾.

¹Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
silviabanibi08@gmail.com

² Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
ullahfadhil69@gmail.com

³ Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
amamanfirmansyah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMP Negeri 2 Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian berjumlah 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III yang mencakup empat variabel utama yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel tersebut digunakan untuk mengetahui baik atau tidaknya implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMP Negeri 2 Mori Utara. bahwa implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMP Negeri 2 Mori Utara belum terlaksana dengan baik. Meskipun sekolah telah melakukan beberapa langkah seperti memasang spanduk larangan merokok dan mengadakan sosialisasi bersama pihak puskesmas, pelaksanaannya masih belum efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya siswa, khususnya laki-laki, serta beberapa guru yang belum menaati aturan KTR, bahkan di jam belajar. Pengawasan yang belum merata dan minimnya penegakan disiplin membuat kebijakan ini belum berjalan sesuai tujuan. Selain itu, penyampaian informasi mengenai KTR belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga sekolah dan pengunjung. Dengan demikian, penerapan KTR di SMP Negeri 2 Mori Utara masih memerlukan peningkatan dalam aspek pengawasan, penegakan aturan, serta pembiasaan perilaku hidup sehat di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: Pelaksanaan Program, Pengawasan, Penegakan Aturan,
Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the No-Smoking Area (KTR) Policy at SMP Negeri 2 Mori Utara, North Morowali Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The study involved 5 informants. The data analysis techniques used include data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The theory used is George C. Edward III's policy implementation theory, which includes four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. These variables were used to assess the effectiveness of the implementation of the No-Smoking Area Policy at SMP Negeri 2 Mori Utara. The results indicate that the implementation of the No-Smoking Area (KTR) Policy at SMP Negeri 2 Mori Utara has not been carried out effectively. Although the school has taken several measures, such as installing no-smoking banners and conducting outreach programs in collaboration with the community health center, implementation remains ineffective. This is evident from the fact that some students, especially male students, and even several teachers still do not comply with the KTR regulations, even during school hours. Uneven supervision and the lack of strict disciplinary enforcement have prevented the policy from running as intended. In addition, the dissemination of information regarding the KTR has not fully reached all school members and visitors. Therefore, the implementation of the KTR policy at SMP Negeri 2 Mori Utara still requires improvement in terms of supervision, rule enforcement, and the cultivation of healthy living habits within the school environment.

Keywords: *Program Implementation, Supervision, Regulation Enforcement, Smoke-Free Areas*

Submisi: 13-07-2026
Diterima: 14-07-2026
Dipublikasikan: 08-08-2026

PENDAHULUAN

Kawasan tanpa rokok merupakan ruang atau lokasi yang ditentukan untuk dilarang melakukan aktivitas merokok atau kegiatan yang terkait dengan produksi penjualan, pemasaran, atau promosi produk tembakau. Di Indonesia, masalah rokok masih menjadi isu penting yang perlu diatasi dengan segera. Hal ini disebabkan oleh dampak rokok yang tidak hanya merugikan kesehatan, tetapi juga berpengaruh pada berbagai aspek penting lainnya, termasuk ekonomi dan sosial.

Respons terhadap berbagai permasalahan yang timbul akibat dampak rokok, Pemerintah Daerah Morowali Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara nomor. 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang pada peraturannya menetapkan tempat belajar dan mengajar sebagai salah satu Kawasan yang bebas rokok. Tujuan dari penerapan kebijakan ini adalah untuk melindungi Masyarakat Indonesia dari bahaya paparan asap rokok dan memberikan kenyamanan saat bernapas dengan udara yang bersih.

Menurut Salingkat (2024) dalam penelitiannya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok (KTR) di Provinsi Sulawesi Tengah, menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam proses implementasinya, terutama komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian tersebut relevan sebagai rujukan dalam memahami faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik pada bidang kesehatan, khususnya kebijakan yang bertujuan menciptakan lingkungan bebas dari paparan asap rokok.

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam penelitian ini, sebagai bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk melindungi Masyarakat dari dampak buruk asap rokok, terutama di tempat umum dan layanan publik, khususnya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Mori Utara Kabupaten Morowali Utara. Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan, yang memiliki peranan penting dalam membangun karakter dan kebiasaan hidup sehat bagi siswa. Oleh karena itu, penerapan kebijakan KTR di area sekolah sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk semua siswa, dan guru, serta para pegawai di sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan terdiri dari kepala sekolah, guru bidang kesiswaan, petugas kantin, osis dan petugas pusat Kesehatan masyarakat (puskesmas). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

Peneliti mengorganisasi dan menyiapkan data seperti transkrip wawancara dan catatan lapangan. Selanjutnya, peneliti membaca seluruh data untuk memperoleh gambaran umum, kemudian melakukan coding untuk mengelompokkan informasi penting. Kode-kode tersebut dikembangkan menjadi tema yang menggambarkan inti temuan penelitian. Tema-tema ini kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, dan pada tahap akhir peneliti melakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap temuan serta menghubungkannya dengan teori atau konteks penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan yang kemudian kaitkan dengan teori dan juga data yang didapatkan, implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di SMP Negeri 2 Mori Utara dari dimensi komunikasi menunjukkan adanya keselarasan antara teori transmisi informasi dengan data yang diperoleh, namun masih terdapat celah pada aspek konsistensi. Secara teoritis, komunikasi yang efektif memerlukan kejelasan dan konsistensi agar pesan dapat diterima dengan baik oleh target kelompok.

Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan guru kesiswaan menunjukkan bahwa proses transmisi informasi telah dilakukan secara rutin melalui apel pagi, rapat dewan guru, dan sosialisasi berkala yang melibatkan pihak Puskesmas. Namun, pengamatan di lapangan mengungkapkan bahwa meskipun media visual seperti spanduk dan papan larangan telah terpasang di beberapa titik strategis, sebagian media tersebut mulai mengalami kerusakan atau belum mencakup seluruh area sensitif sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi telah tersampaikan (transmisi), konsistensi pesan dalam bentuk pemeliharaan sarana komunikasi visual masih perlu ditingkatkan agar kebijakan KTR tetap tersosialisasi secara permanen bagi siswa maupun tamu yang berkunjung ke lingkungan sekolah.

Aspek komunikasi, terdapat relevansi yang signifikan antara penelitian terdahulu oleh Khairutunnisa (2021) dengan temuan di SMP Negeri 2 Mori Utara mengenai efektivitas penyampaian informasi. Penelitian terdahulu di SMA Negeri 17 Medan menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi telah dilakukan, kebijakan KTR sering kali dianggap sepele oleh warga sekolah karena kurangnya informasi mengenai pedoman teknis yang mendalam.

Hasil penelitian terdahulu di atas, sejalan dengan hasil penelitian di SMP Negeri 2 Mori Utara, di mana proses transmisi informasi melalui apel pagi, rapat guru, dan sosialisasi Puskesmas telah berjalan, namun belum mampu menjangkau seluruh sasaran secara merata, termasuk tamu dan orang tua siswa. Relevansi ini menunjukkan bahwa hambatan utama dalam komunikasi bukan terletak pada ada atau tidaknya sosialisasi, melainkan pada kejelasan dan konsistensi pesan yang disampaikan agar dapat mengubah persepsi serta perilaku seluruh elemen sekolah agar tidak mengabaikan aturan yang berlaku.

Aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana pendukung. Keterbatasan tenaga pendukung di sekolah, seperti belum tersedianya guru bimbingan dan konseling, membuat proses pembinaan dan pemberian pemahaman kepada siswa belum dapat dilakukan secara optimal. Kondisi serupa juga terlihat pada puskesmas yang memiliki keterbatasan jumlah petugas untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai kawasan tanpa asap rokok. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas pengawasan, seperti belum tersedianya CCTV, menyebabkan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran belum berjalan secara maksimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan saja belum cukup untuk menjamainya, karena diperlukan dukungan personel yang memadai serta sarana pengawasan yang sesuai. Dengan demikian, penguatan sumber daya manusia dan penyediaan fasilitas pendukung menjadi bagian penting agar pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa asap rokok dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Aspek disposisi atau sikap pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen dari pihak sekolah dalam menjalankan kebijakan kawasan tanpa asap rokok sudah terlihat,

tetapi dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada konsistensi perilaku. Hal ini terlihat dari masih adanya guru laki-laki yang merokok di lingkungan sekolah, bahkan pada saat jam belajar berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen terhadap kebijakan dengan praktik di lapangan, sehingga keteladanan pelaksana belum sepenuhnya mendukung tujuan kebijakan. Sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan peserta didik, perilaku guru memiliki pengaruh terhadap terbentuknya kepatuhan dan budaya sekolah yang bebas asap rokok. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap aturan, tetapi juga sikap konsisten, kedisiplinan, dan keteladanan dari para pelaksana agar aturan dapat diterapkan secara nyata dan menjadi kebiasaan dalam lingkungan sekolah.

Aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih terkendala oleh belum tersedianya SOP tertulis yang jelas di tingkat sekolah. Kondisi ini menyebabkan pembagian tugas, mekanisme pengawasan, serta langkah yang harus dilakukan ketika terjadi pelanggaran belum memiliki pedoman yang seragam. Persoalan tersebut semakin kompleks karena keterbatasan sumber daya manusia membuat beberapa pelaksana harus menangani tugas tambahan di luar tanggung jawab utamanya. Akibatnya, kegiatan pengawasan terhadap penerapan kawasan tanpa asap rokok belum dapat dilakukan secara konsisten dan penegakan aturan masih bergantung pada inisiatif masing-masing pelaksana. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak hanya berkaitan dengan keberadaan organisasi, tetapi juga membutuhkan prosedur kerja yang jelas dan pembagian tanggung jawab yang proporsional. Oleh karena itu, penyusunan SOP yang mudah dipahami, pembagian tugas yang lebih jelas, serta penguatan koordinasi antartugas diperlukan agar pengawasan dan penegakan kebijakan dapat berjalan secara lebih terarah dan konsisten.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian terhadap fokus kajian penelitian yaitu Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMP Negeri 2 Mori Utara, dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan Publik dari George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka dapat disimpulkan Implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di SMP Negeri 2 Mori Utara telah berjalan namun belum Optimal.

Aspek sumber daya menjadi salah satu isu utama, terlihat dari kekurangan tenaga pelajar seperti tidak adanya guru bimbingan konseling, serta minimnya jumlah petugas puskesmas untuk melakukan tugas sosialisasi. Selain itu, alat pendukung seperti CCTV juga belum tersedia, yang mengakibatkan pengawasan terhadap pelanggaran belum berjalan dengan baik.

Aspek disposisi (sikap pelaksana) juga menunjukan tantangan yang cukup besar. Walaupun adanya komitmen pihak sekolah, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh guru laki-laki yang merokok di lingkungan sekolah bahkan saat jam belajar. Ini mengindikasikan bahwa keteladanan dan disiplin dari pihak pelaksana belum sesuai harapan.

Aspek struktur birokrasi menjadi penghalang, terutama belum adanya SOP tertulis yang jelas dari pihak sekolah serta adanya penumpukan tugas akibat keterbatasan sumber daya manusia di sekolah situasi ini berpengaruh pada tidak optimalnya pengawasan dan penegakan peraturan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan paradigma administrasi publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2). DOI: <https://doi.org/10.24252/profetik.v4i2a4>
- Basri, M. S. (2020). Implementasi kawasan tanpa rokok di Kota Palu [Skripsi, Universitas Tadulako].
- Bungin, B. (2005). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fernando, R., & Marom, A. (2016). Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 5(2), 466–479. DOI: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.11087>
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.
- Kadir, A. (2020). Fenomena kebijakan publik dalam perspektif administrasi publik di Indonesia. Dharmasraya: Dharma Persada Dharmasraya.
- Kasim, A. (1993). Perkembangan ilmu administrasi publik. Manajemen Pembangunan, 3.
- Khairatunnisa, K., & Telaumbanua, I. P. (2021). Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di SMA Negeri 17 Medan. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(3), 247–255. DOI: <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i3.8918>
- Malawat, S. H. (2022). Pengantar administrasi publik. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary.
- Masengi, E., Lumingkewas, M. C. E., & Supit, F. B. (2015). Pengantar administrasi publik. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Melati, T., & Asmorowati, S. (2023). Evaluasi kebijakan publik dalam mendorong inklusi sosial: Tinjauan dari perspektif kebijakan publik. *Jurnal Darma Agung*, 31(3), 257–267. DOI: <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v3i3.3453>
- Muhiddin, A. (2017). Evaluasi kebijakan publik: Studi kesiapan desa menerima dana desa di Kabupaten Gowa [Disertasi, Universitas Negeri Makassar]. Repositori Universitas Negeri Makassar. <https://eprints.unm.ac.id/4365/>
- Muryadi, A. D. (2017). Model evaluasi program dalam penelitian evaluasi. *Jurnal Ilmiah PENJAS (Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran)*, 3(1), 1–16. <https://ejournal.utp.ac.id/index.php/JIP/article/view/538>
- Mustanir, A., et al. (2022). Pengantar ilmu administrasi publik. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Mustanir, A., Suprpto, Aromatica, D., Utari, D. S., Nugroho, L., Faried, A. I., Kusnadi, I. H., Soeharjoto, Purnamaningsih, P. E., & Wismayanti, K. W. D. (2023). *Dinamika administrasi publik Indonesia*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi.
- Nasution. (2003). Metode penelitian naturalistik kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nur, A. C., & Guntur, M. (2019). Analisis kebijakan publik. Makassar: Publisher UNM.
- Rochka, M. M., Anwar, A. A., & Rahmadani, S. (2019). Kawasan tanpa rokok di fasilitas umum. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Rodiyah, I., Choiriyah, S. U., & Sukmana, H. (2022). Buku ajar pengantar ilmu administrasi

publik. Sidoarjo: UMSIDA Press.

- Salingkat, S. (2024). Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kawasan tanpa Asap Rokok di Provinsi Sulawesi Tengah . Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, Vol. 4, No. 2, hal.1-10. DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1930>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan publik. Surabaya: Menuju Insan Cemerlang.
- Sufiani, S. (2018). Implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok pada Pusat Kesehatan Masyarakat Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Katalogis, 6(9), 141–147. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/17395>
- Sutopo, H. B. (2002). Metodologi penelitian kualitatif. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Tachjan. (2006). Implementasi kebijakan publik. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) bekerja sama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). Implementasi kebijakan publik: Transformasi pikiran George Edwards. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Tjilen, P. A., & Pipilaya, F. (2019). Konsep, teori dan teknik: Analisis implementasi kebijakan publik (Studi implementasi program rencana strategis pembangunan kampung). Bandung: Nusa Media.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service (CAPS).
- Zuriah, N. (2009). Metodologi penelitian sosial dan pendidikan: Teori-aplikasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

TENTANG PENULIS